

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan belanja modal, pendidikan, investasi, ekspor netto, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran antara wilayah Sumatera periode 2019-2023 yaitu :

- a. Tren belanja modal di provinsi-provinsi Pulau Sumatera selama 2019-2023 menunjukkan variasi yang cukup signifikan, dengan beberapa provinsi mengalami pertumbuhan yang konsisten, sementara yang lain menghadapi fluktuasi atau bahkan penurunan. Aceh mengalami perubahan yang tajam, menunjukkan ketidakstabilan dalam alokasi anggaran. Provinsi seperti Aceh, yang sebagian besar belanja modalnya bersumber dari dana otonomi khusus dan transfer pusat, sangat rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional dan keterlambatan pencairan anggaran. Selain itu, pergantian kepala daerah dan birokrasi yang belum stabil juga dapat memengaruhi prioritas dan konsistensi dalam perencanaan pembangunan. Dalam beberapa kasus, rendahnya kapasitas teknis dalam menyusun dan melaksanakan proyek belanja modal menyebabkan banyak program tidak terealisasi sesuai target.

Evaluasi perencanaan yang lemah serta kurangnya pengawasan juga berkontribusi terhadap tidak optimalnya belanja modal di provinsi tersebut. Sumatera Utara dan Riau mencatat pertumbuhan belanja modal tertinggi dengan tren yang lebih konsisten, mengindikasikan kebijakan anggaran yang lebih terarah. Sebaliknya, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Kepulauan Riau menunjukkan tren pertumbuhan yang kurang stabil, sementara Jambi mengalami fluktuasi ekstrem, yang dapat berdampak pada efektivitas pembangunan. Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung memiliki pertumbuhan yang relatif stabil, sedangkan Sumatera Selatan mengalami tren negatif yang bisa mengindikasikan pengurangan investasi atau perubahan kebijakan belanja modal. Secara keseluruhan, variasi ini mencerminkan perbedaan dalam strategi pengelolaan anggaran di setiap provinsi di Sumatera.

- b. Rata-rata lama sekolah di provinsi-provinsi Pulau Sumatera meningkat selama 2019-2023, tetapi masih terdapat ketimpangan antarwilayah. Kepulauan Riau mencatat angka tertinggi pada 2023 (10,52 tahun), Kepulauan Riau yang memiliki konsentrasi ekonomi lebih tinggi dan akses lebih baik terhadap fasilitas pendidikan cenderung menarik lebih banyak investasi di sektor pendidikan, baik dari pemerintah maupun swasta. Sementara itu, provinsi-provinsi dengan daerah terpencil dan keterbatasan anggaran menghadapi tantangan besar dalam pemerataan layanan pendidikan. Selain itu,

faktor budaya dan tingkat partisipasi sekolah pada kelompok usia tertentu juga memengaruhi angka rata-rata lama sekolah. Sementara Kepulauan Bangka Belitung memiliki angka terendah (8,66 tahun). Jambi mengalami peningkatan dari 8,86 tahun (2019) menjadi 9,16 tahun (2023), tetapi masih tertinggal dibandingkan provinsi lain seperti Sumatera Utara dan Riau.

- c. Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di provinsi-provinsi Pulau Sumatera selama 2019-2023 menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh infrastruktur, kebijakan pemerintah, dan potensi sektor unggulan. Riau mencatat investasi tertinggi dengan rata-rata Rp35.343 miliar, Capaian ini disebabkan oleh sejumlah faktor strategis yang membuat provinsi ini sangat menarik bagi investor, baik domestik maupun asing. Salah satu faktor utama adalah kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, terutama di sektor minyak dan gas bumi serta perkebunan kelapa sawit, yang telah lama menjadi andalan ekonomi Riau. Diikuti oleh Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, sementara Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Barat memiliki nilai investasi yang lebih rendah. Fluktuasi investasi terjadi di beberapa provinsi, seperti Aceh dan Kepulauan Riau, yang mengalami lonjakan besar di satu tahun tetapi kontraksi tajam di tahun berikutnya. Lampung mencatat pertumbuhan investasi tertinggi dengan rata-rata 56,83%, sedangkan Jambi menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan 24,90%.

Secara keseluruhan, provinsi dengan infrastruktur yang lebih baik dan kebijakan investasi yang stabil cenderung menarik lebih banyak investasi, sementara provinsi yang mengalami fluktuasi memerlukan strategi kebijakan yang lebih konsisten untuk meningkatkan daya tarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

- d. Provinsi Riau mencatat nilai ekspor netto tertinggi di Sumatera selama 2019-2023 dengan rata-rata 17.000,3 juta US\$ dan tren pertumbuhan yang relatif stabil, capaian ini dikarenakan struktur ekonomi Riau yang sangat kuat di sektor-sektor berorientasi ekspor, terutama minyak dan gas bumi (migas) serta kelapa sawit dan produk turunannya. Sektor migas, meskipun menghadapi fluktuasi harga dunia, tetap menjadi kontributor utama karena volume produksinya yang besar dan infrastruktur ekspor yang lengkap. Selain itu, sektor perkebunan kelapa sawit di Riau juga sangat dominan, dengan ribuan hektare lahan yang menghasilkan crude palm oil (CPO) dan bahan baku turunan yang memiliki permintaan tinggi di pasar global. Sedangkan Sumatera Utara dan Sumatera Selatan berada di posisi berikutnya meskipun mengalami fluktuasi. Jambi dan Kepulauan Riau mencatat angka ekspor netto lebih rendah dengan volatilitas yang cukup tinggi, seperti lonjakan Jambi pada 2021 sebesar 133,60% sebelum turun drastis pada 2023. Beberapa provinsi dengan nilai ekspor netto lebih kecil, seperti

Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung, juga menunjukkan pertumbuhan yang tidak stabil. Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau mengalami dinamika ekspor netto yang cukup tajam, dengan kenaikan dan penurunan signifikan dalam beberapa tahun. Secara keseluruhan, meskipun beberapa provinsi mencatat pertumbuhan ekspor netto yang tinggi, fluktuasi yang terjadi mencerminkan ketidakstabilan perdagangan luar negeri di Sumatera dalam lima tahun terakhir.

- e. Pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi Sumatera selama 2019-2023 menunjukkan tren pemulihan setelah kontraksi akibat pandemi COVID-19 pada 2020, dengan Kepulauan Riau mengalami kontraksi terdalam (-3,8%) dan Sumatera Selatan paling ringan (0,11%). Jambi mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi rata-rata 3,90% selama lima tahun, dikarenakan sejumlah faktor utama yang saling bersinergi. Pertama, sektor pertambangan dan perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi Jambi menunjukkan kinerja yang relatif stabil, khususnya dalam komoditas unggulan seperti batu bara, minyak bumi, karet, dan kelapa sawit. Kedua, adanya peningkatan investasi di sektor pengolahan dan infrastruktur turut mendorong aktivitas ekonomi, terutama di wilayah yang sedang berkembang seperti Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat. Sementara Sumatera Utara dan Sumatera Selatan juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil. Meskipun beberapa

provinsi seperti Aceh, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung memiliki rata-rata pertumbuhan lebih rendah dari 3,5%, pemulihan ekonomi di sebagian besar wilayah cukup baik, dengan Riau dan Lampung mencatat pertumbuhan signifikan pada 2023. Secara keseluruhan, meskipun terjadi fluktuasi di beberapa daerah, ketahanan ekonomi Sumatera cukup kuat, terutama di provinsi dengan sektor unggulan yang mendukung pemulihan cepat. Ke depan, penguatan sektor ekonomi utama di setiap provinsi diperlukan untuk memastikan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan.

- f. Tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi Sumatera selama 2019-2023 menunjukkan tren fluktuatif, dengan Aceh memiliki tingkat kemiskinan tertinggi rata-rata 14,95% yang dikarenakan perekonomian Aceh masih sangat bergantung pada sektor primer seperti pertanian dan perikanan yang rentan terhadap fluktuasi cuaca dan harga komoditas, diikuti oleh Bengkulu dan Sumatera Selatan, sementara Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau mencatat angka terendah. Sebagian besar provinsi mengalami penurunan tingkat kemiskinan, seperti Aceh dari 15,32% (2019) menjadi 14,45% (2023) dan Sumatera Utara dari 8,83% menjadi 8,15%. Beberapa daerah, seperti Jambi dan Sumatera Selatan, mengalami fluktuasi sebelum akhirnya menunjukkan tren penurunan. Riau dan Kepulauan Riau cenderung stabil, sementara

Lampung dan Bengkulu mengalami penurunan bertahap. Kesenjangan antarprovinsi masih menjadi tantangan, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, serta akses pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan perlu mempertimbangkan kondisi spesifik di setiap daerah dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi lokal untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.

- g. Tingkat pengangguran di provinsi-provinsi Sumatera selama 2019-2023 menunjukkan variasi yang signifikan, dengan Kepulauan Riau dan Aceh mencatat angka tertinggi, masing-masing 6,80% dan rata-rata 6,25%, tingginya tingkat pengangguran lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan investasi swasta dan rendahnya diversifikasi ekonomi. Sementara Bengkulu dan Sumatera Selatan memiliki tingkat terendah, stabil di sekitar 3,60%-4,11%. Beberapa provinsi seperti Riau menunjukkan perbaikan signifikan dengan penurunan dari 5,97% pada 2019 menjadi 4,23% pada 2023, mencerminkan perbaikan pasar kerja. Namun, Kepulauan Riau mengalami lonjakan pengangguran pada 2020-2022 akibat dampak pandemi sebelum akhirnya menurun, sementara Aceh masih menghadapi tantangan besar dalam penciptaan lapangan kerja. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa provinsi berhasil menekan tingkat pengangguran, perbedaan kondisi ekonomi di

setiap wilayah memerlukan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih spesifik dan berbasis kebutuhan daerah.

2. Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran di provinsi-provinsi Sumatera menunjukkan bahwa belanja modal, pendidikan, investasi, dan ekspor netto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa belanja modal, pendidikan, investasi, dan ekspor netto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, hasil penelitian lainnya menunjukkan belanja modal, pendidikan dan ekspor netto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi Sumatera, pemerintah daerah perlu mengalokasikan belanja modal secara lebih efektif dan tepat sasaran, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya akan memperlancar distribusi barang dan jasa, sehingga meningkatkan daya saing daerah. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat sektor pendidikan dengan meningkatkan akses dan kualitas

pendidikan di seluruh wilayah, khususnya di daerah terpencil. Program pelatihan dan pendidikan vokasi harus dikembangkan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudahan dalam regulasi investasi juga harus menjadi perhatian utama agar investor lebih tertarik menanamkan modalnya di sektor produktif yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi lokal. Tidak hanya itu, peningkatan ekspor netto perlu didukung dengan diversifikasi produk unggulan serta peningkatan daya saing komoditas daerah agar mampu bersaing di pasar global. Pemerintah juga dapat mendorong sektor UMKM untuk berorientasi ekspor dengan memberikan pelatihan, pendampingan, serta akses permodalan yang memadai.

2. Dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil mampu menciptakan lapangan kerja yang luas dan berkualitas. Program padat karya dapat menjadi solusi jangka pendek dalam menyerap tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan khusus. Selain itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan perlu diperkuat agar lulusan pendidikan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Investasi di sektor industri padat karya dan sektor berbasis teknologi harus ditingkatkan agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan berkelanjutan. Sementara itu, pengembangan sektor pertanian dan perikanan juga harus menjadi prioritas, mengingat banyaknya masyarakat di Sumatera yang menggantungkan hidup pada sektor ini.

Pemerintah perlu memberikan insentif bagi petani dan nelayan, seperti bantuan modal usaha, teknologi modern, serta akses pasar yang lebih luas. Dengan kebijakan yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat tercapai, sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran secara signifikan.